



**ECONUSA**  
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

Laporan Tahunan EcoNusa

Tahun 2023

# KOLABORASI MEMPERKUAT

# DAMPAK



Tokoh masyarakat adat suku Moi di Kampung Malagufuk. Masyarakat suku Moi di Malaumkarta Raya melakukan Egek hutan yang merupakan kearifan lokal dalam konservasi hutan dan laut.



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>	<b>SEKILAS ECONUSA</b>	<b>4</b>
<b>ECOTEAM</b>	<b>5</b>	<b>SEKAPUR SIRIH DARI CEO</b>	<b>6</b>
<b>VISI DAN MISI</b>	<b>8</b>	<b>NILAI-NILAI ORGANISASI</b>	<b>9</b>
<b>BAB 1:</b> Memperkuat Kemandirian dengan Inisiatif Lokal	<b>11</b>	<b>BAB 2:</b> Advokasi dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	<b>17</b>
<b>BAB 3:</b> Pemuda Pengerak Aksi	<b>25</b>	<b>BAB 4:</b> Kampanye Digital	<b>31</b>
<b>BAB 5:</b> Kolaborasi untuk Tata Kelola Laut yang Sehat dan Berkelanjutan	<b>37</b>	<b>BAB 6:</b> Memperkuat Nilai Produk Masyarakat Adat untuk Kemandirian Ekonomi Lokal	<b>43</b>
<b>BAB 7:</b> EcoFund & Mitra Kolaborator	<b>49</b>	<b>BAB 8:</b> Operasional, Keuangan, & Sumber Daya	<b>57</b>

# SEKILAS ECONUSA

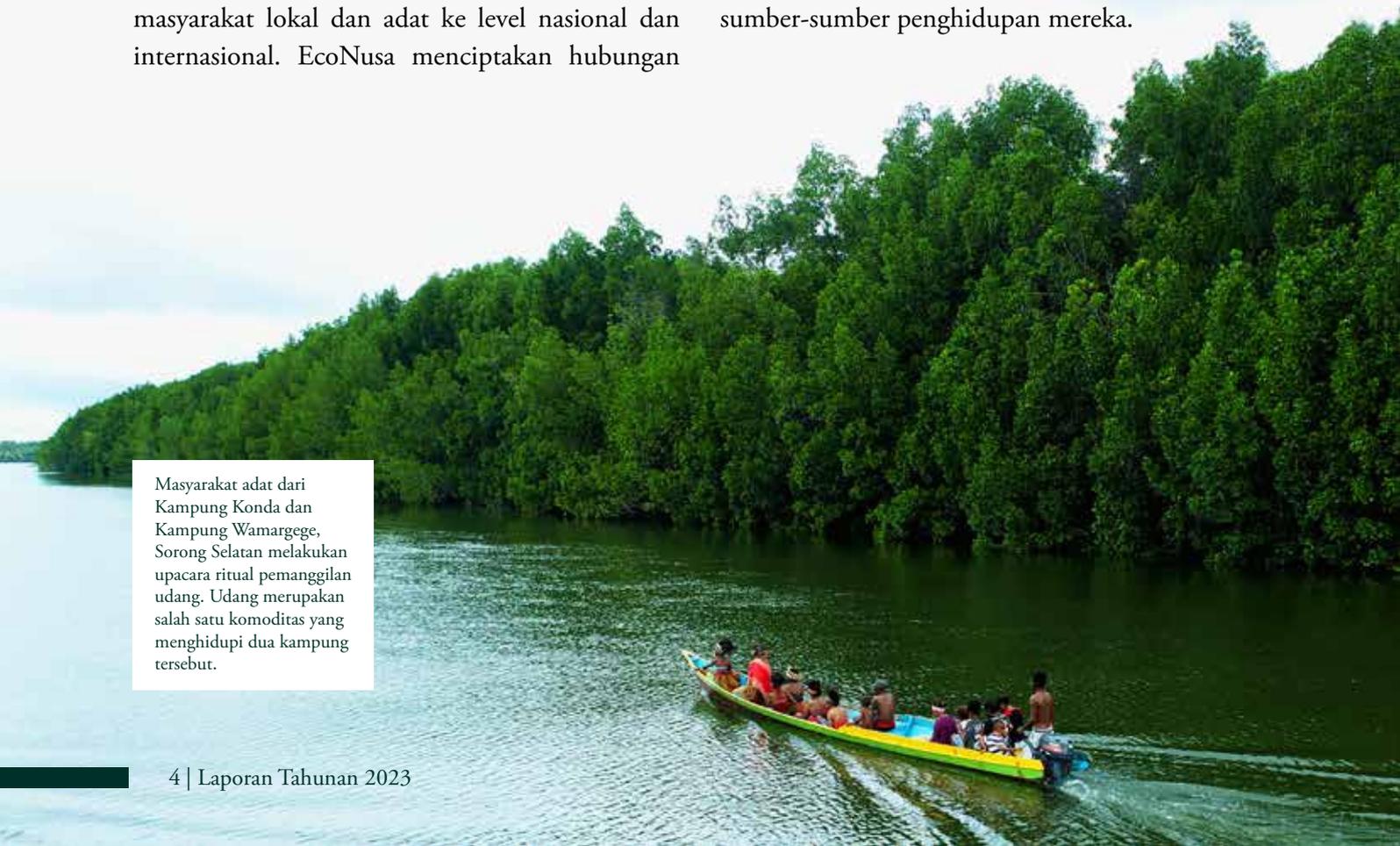
**Y**ayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EcoNusa) merupakan organisasi nirlaba bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan dari sumber daya alam yang kaya di wilayah timur Indonesia. Kami mendorong pembangunan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat madani serta bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan strategi komunikasi, advokasi, dan pelibatan pemangku kepentingan untuk mengedepankan keadilan, konservasi, dan transparansi.

EcoNusa membangun jembatan kolaborasi antara pemangku kepentingan di wilayah timur Indonesia untuk menghubungkan inisiatif masyarakat lokal dan adat ke level nasional dan internasional. EcoNusa menciptakan hubungan

strategis dalam membentuk ketahanan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, mendukung hak masyarakat adat melalui advokasi kebijakan dan pembangunan rendah karbon, mobilisasi kelompok anak muda, memperkuat kapasitas dan peran kelembagaan, dan meningkatkan ekonomi lokal.

Strategi EcoNusa dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan ketahanan masyarakat, advokasi dan kerjasama strategis, pelestarian ekologi, dan dukungan komunikasi strategis dan kepemudaan untuk Indonesia Timur menjadi upaya kami untuk memastikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat adat dan sumber-sumber penghidupan mereka.

Masyarakat adat dari Kampung Konda dan Kampung Wamargege, Sorong Selatan melakukan upacara ritual pemanggilan udang. Udang merupakan salah satu komoditas yang menghidupi dua kampung tersebut.



# ECOTEAM

## Jajaran Pembina dan Pengawas

### Pembina

Zulfahmi  
Felia Salim  
Yan Piet Karafir  
Nurhani Widiastuti  
Ridho Hafiedz

### Pengawas

Julia Kalmirah

## Jajaran Eksekutif

### Ketua Pengurus Yayasan / Kepala Eksekutif

Bustar Maitar

### Bendahara Yayasan & Direktur Operasional

Etik Mei Wati

### Sekretaris Yayasan

Aprilyanti Sirait

# SEKAPUR SIRIH DARI CEO

## Memulai 2024 dengan Strategi Baru

**D**i tahun 2023 ini, daya lenting EcoNusa kembali diuji. Jika dua tahun berturut-turut tantangan terbesar adalah bagaimana beradaptasi dengan Pandemi Covid-19, tahun ini tantangan terbesar kami adalah terkait pendanaan. Pada akhir Mei 2023, salah satu project terbesar EcoNusa yang sudah berjalan sejak 2019 harus berakhir di luar ekspektasi karena situasi eksternal yang sulit diintervensi. Masa akhir proyek ini awalnya diharapkan pada Desember 2023. Hal ini tentu saja berdampak terhadap banyak hal, terutama dalam hal perencanaan, operasional, dan sumber daya manusia.

Di pertengahan 2023, kami melakukan banyak penyesuaian. Kami memastikan bahwa meskipun di tengah kekurangan pendanaan, seluruh program tetap berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada akhirnya, pendanaan yang dibutuhkan sepanjang pertengahan hingga akhir 2023 tetap tercukupi, melalui dukungan berbagai pihak, terutama para donor kami. Ketersediaan donor untuk memberikan fleksibilitas dalam realokasi anggaran program dan tambahan dukungan pendanaan memperkuat optimisme kami melewati masa-masa sulit. Namun hal terpentingnya adalah bagaimana kami memastikan keberlanjutan program di 2024 dan tahun-tahun mendatang.

Saya rasa, pendanaan adalah tantangan terbesar bagi NGO pada umumnya, bukan hanya bagi EcoNusa. Namun, sejak awal berdirinya, EcoNusa berkomitmen untuk membangun kemandirian. Kami tidak ingin pendanaan menjadi halangan untuk keberlanjutan. Dampak dan manfaat harus

**Bustar Maitar,**  
CEO EcoNusa.

tetap dirasakan dan berlanjut oleh masyarakat dan ekosistem, meskipun program berakhir. Bagi EcoNusa, inisiatif untuk kemandirian masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, tidak akan pernah berakhir.

Cita-cita kemandirian ini juga yang awalnya menginspirasi pendirian PT Ekosistem Bumi Lestari (KOBUMI) pada 2022 lalu dengan semangat mengembalikan kedaulatan masyarakat dalam perekonomian. KOBUMI hadir dengan tiga tujuan utama. Pertama, sebagai wadah untuk distribusi dan pemasaran produk-produk komunitas di wilayah Indonesia Timur. Kedua, sebagai wadah untuk peningkatan kualitas produk, guna memastikan produk komunitas mampu bersaing di tingkat global. Ketiga, sebagai wadah pembelajaran yang memfasilitasi penelitian terkait sumber daya alam di Indonesia Timur. Maka, sepanjang 2023 ini, KOBUMI telah berhasil melakukan pengiriman pala sebanyak 82,6 ton untuk pasar Jakarta dan Surabaya. KOBUMI juga telah mengumpulkan udang hasil tangkapan sebanyak 1,6 ton yang dipasarkan di Sorong dan Jakarta.

Di tahun ini, kami memperbaharui Rencana Strategis (Renstra) kami, untuk masa implementasi 2024-2028. Renstra sebelumnya telah berakhir untuk masa implementasi 2019-2023. Penyusunan dokumen Renstra dimulai dengan sebuah kajian eksternal bertajuk: “Membaca Ulang Indonesia Timur.” Kajian ini bertujuan untuk melihat Tanah Papua dan Kepulauan Maluku dari berbagai aspek, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga melihat potensi ancaman investasi yang akan berdampak pada makin meluasnya kerusakan hutan dan laut atas nama pembangunan. Hasil kajian ini kemudian akan kami gunakan untuk melakukan kajian internal, untuk melihat sejauh mana kami harus melakukan penyesuaian di 2024 hingga tahun-tahun mendatang. Apakah strategi pendampingan masyarakat, advokasi, hingga komunikasi yang kami jalankan selama ini masih

relevan atau dibutuhkan penyesuaian kembali?

Beberapa tahun terakhir, dinamika politik di Tanah Papua bergerak cukup dinamis dan menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama pasca-penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada akhir 2022 lalu. Kami menyebut 2023 sebagai Tahun Politik. Dengan adanya DOB ini, banyak hal berubah, mulai dari struktur pemerintahan hingga rencana pembangunan yang akan diusung oleh masing-masing provinsi. Menjaga Tanah Papua adalah sebuah pekerjaan besar yang tidak mungkin dilakukan sendirian. Oleh karena itu, EcoNusa mengedepankan kolaborasi bersama banyak pihak, terutama dengan sesama NGO dan CSO lokal yang bekerja di sana. Maka, meskipun kajian ini pada dasarnya dilakukan untuk kebutuhan penyusunan Rencana Strategis, kami berharap hasilnya dapat digunakan oleh banyak pihak. Bagi Pemerintah Daerah, hasil kajian ini dapat menjadi semacam “Buku Putih” sebagai acuan dalam merancang perencanaan pembangunan. Bagi CSO lokal yang bekerja di Tanah Papua, kajian ini juga dapat digunakan untuk acuan menetapkan rencana program strategis untuk mendukung sektor pemerintahan. Sementara bagi lembaga donor yang selama ini punya komitmen dukungan dalam menjaga dan melestarikan ekosistem dan sumber daya alam Tanah Papua, kajian ini juga bisa dijadikan dasar program pendanaan strategis yang bisa diberikan.

Pada 2024 ini, kami berharap akan terus mampu memperkuat kolaborasi multi-pihak dengan semangat dan strategi baru. Kami berkomitmen untuk tetap konsisten dalam bekerja untuk lingkungan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

**Bustar Maitar**  
CEO Yayasan EcoNusa

# VISI DAN MISI

**VISI** Mewujudkan kedaulatan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- MISI**
- 1** Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.
  - 2** Memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas mitra LSM lokal dalam pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.
  - 3** Mempromosikan pembelajaran dan praktik-praktik terbaik yang dilakukan LSM lokal dan masyarakat ke tingkat nasional dan internasional tentang pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.
  - 4** Mengorganisasi kaum muda khususnya di kawasan perkotaan untuk mendukung gerakan kedaulatan pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berkelanjutan.
  - 5** Memperkuat kapasitas organisasi EcoNusa sebagai organisasi perubahan yang efektif dan akuntabel untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi atau mandat-mandatannya.

# NILAI-NILAI ORGANISASI



**Keadilan Sosial dan Lingkungan**



**Kesetaraan**



**Transformasi**



**Akuntabilitas**



**Integritas**



**Keunggulan**



**Inklusivitas**





Peserta kelas budi daya kakao tengah belajar cara merawat tanaman kakao di Sekolah Transformasi Sosial (STS) Manokwari Selatan. Memperkuat ekonomi untuk perlindungan hutan dan hak.



# **BAB 1:**

## **Memperkuat Kemandirian dengan Inisiatif Lokal**

## Sekolah Kampung

**350** Peserta Sekolah Kampung

**28** Kampung Terlaksana

---

## Inisiatif Lokal

**88** Inisiatif & RTL pengelolaan potensi lokal

**47** Kampung baru didampingi

Masyarakat menggondong babi hasil buruan. Babi hutan adalah sumber ekonomi penting dan sumber protein bagi masyarakat adat.

# Mama-Mama di Kampung Mibi Kini Berbisnis Keripik Keladi



Keripik Keladi MIBI hasil olahan mama-mama Kelompok Sinifagu, Sorong, Papua Barat Daya.

Mama Helena (50 tahun) tidak pernah bermimpi untuk bisa memiliki usaha dan sumber penghasilan sendiri. Sehari-hari ia hanya mengurus urusan rumah tangga sambil sesekali membantu suaminya mengolah kebun yang tidak seberapa luas. Tanaman yang dipelihara pun kebanyakan tanaman jangka panjang yang tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Panen dilakukan pada musim-musim tertentu saja.

Pada awal 2023, EcoNusa menawarkan inisiatif pengolahan buah keladi menjadi keripik. Mama Helena diminta menginisiasi pembentukan kelompok mama-mama di Kampung Mibi. Ia pun mengajak sebanyak 10 orang mama-mama lainnya untuk bergabung dalam kelompok yang diberi nama 'Sinifagu'. Sebagai bagian dari pendampingan awal, EcoNusa menyediakan dukungan peralatan produksi dan asistensi proses produksi untuk memastikan kualitas produk. EcoNusa juga mendukung dalam hal mencari pasar.

Komoditi keladi dipilih untuk inisiatif pengembangan ekonomi, karena melihat potensi yang bagus di Kampung Mibi. Namun, selama ini keladi dikembangkan hanya untuk sekedar kebutuhan makan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui Musyawarah Kampung (Muskam) yang diselenggarakan pada 2023, Kepala Kampung dan masyarakat menyepakati untuk membuka lahan seluas 0,5 hektare yang nantinya akan dikelola bersama untuk mendukung bisnis keripik keladi ini. Lahan seluas ini, dengan bibit sebanyak 500 pohon, mampu menghasilkan 10 ton setiap

panen. Biasanya panen keladi dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Pengelolaan usaha keripik keladi di Kampung Mibi, secara tidak langsung juga membuka rantai pasok hasil panen dari kampung sekitar, sesuai kebutuhan. Selain menampung panen dari kampung-kampung di wilayah Malaumkarta, kelompok ini menampung hasil panen dari Kampung Klafyo, Kabupaten Sorong. Kampung Klafyo merupakan salah satu kampung dampingan EcoNusa, dan merupakan salah satu kampung peserta Sekolah Transformasi Sosial (STS). Pasca-pelatihan STS pada 2021 lalu, peserta STS dari Kampung Klafyo, dengan didukung oleh Kepala Kampung, memilih mengembangkan keladi sebagai bagian dari rencana tindak lanjut pasca-pelatihan.

Usaha keripik keladi yang dikembangkan Kelompok Sinifagu, kini, dengan produksi rutin setiap minggu, telah menjadi wadah sumber penghasilan tambahan bagi anggota kelompok. Dalam sebulan, rata-rata anggota kelompok bisa memperoleh sebesar Rp 1 juta rupiah, di luar biaya produksi. Untuk pemasaran, hasil produksi biasanya dibawa ke Kota Sorong. Saat ini, telah ada kerjasama penjualan dengan 15 outlet pemasaran di Kota Sorong, sehingga proses produksi bisa dilakukan secara berkelanjutan.



Senang sekali. Dulu Mama tidak punya penghasilan. Cuma bantu-bantu Bapa urus kebun. Sekarang Mama bisa punya uang sendiri. Mama bisa bantu beli kebutuhan dapur, sama bantu biaya sekolah anak-anak. Sebagai perempuan, kita juga senang bisa punya kontribusi, bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi, kami cuma bisa produksi pada siang hari. Kalau malam hari tidak bisa, karena di kampung kami belum ada listrik.



**Helena Sapisa**

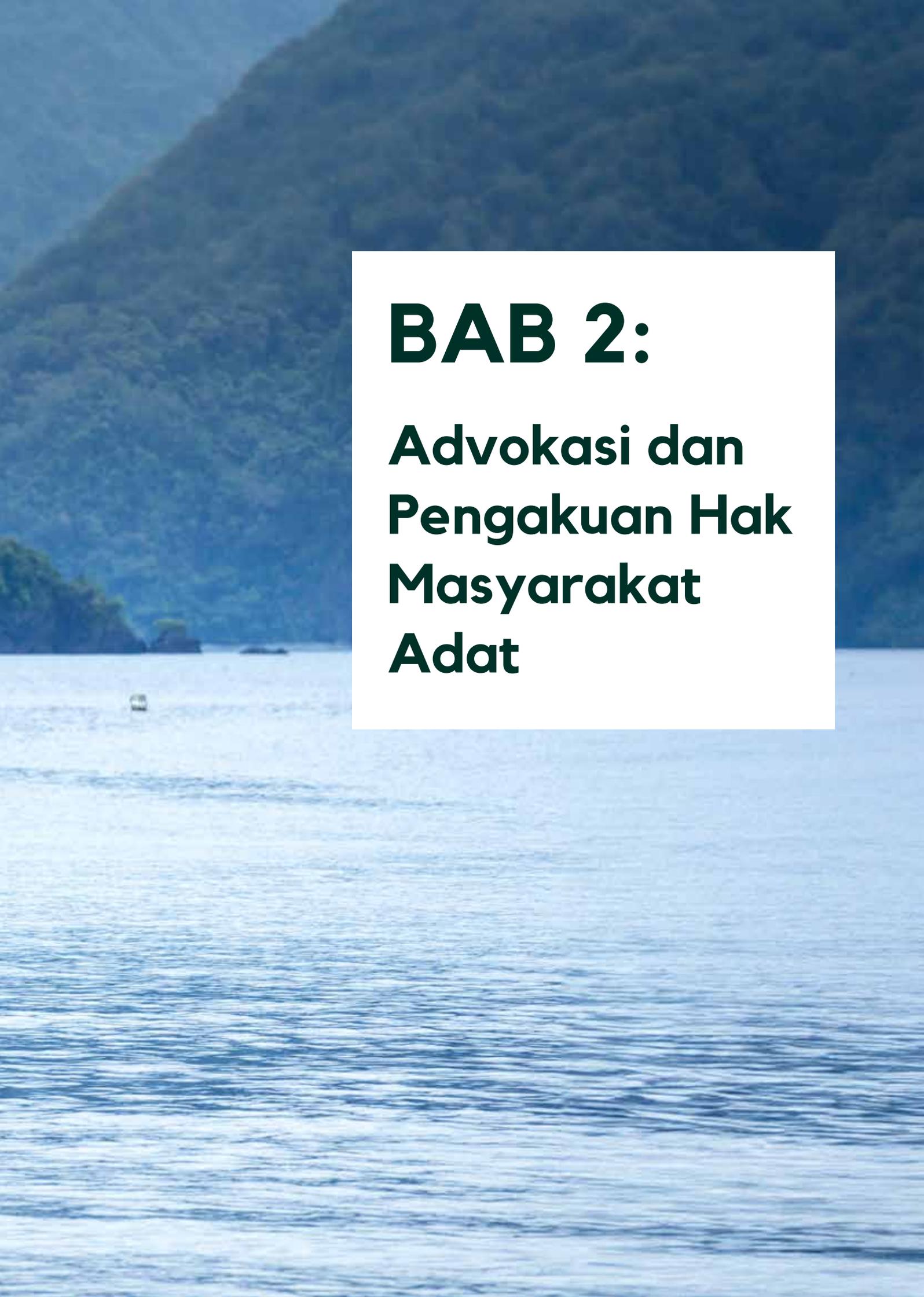
Ketua Kelompok Sinifagu



Mama-mama kelompok tani dari Arefi, Raja Ampat, Papua Barat Daya membawa panen kebun mereka. Selain untuk mencukupi kebutuhan gizi rumah tangga, hasil panen juga dijual ke masyarakat kampung, homestay dan resort di Raja Ampat







# **BAB 2:**

## **Advokasi dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat**

# Pemetaan Wilayah Adat untuk Memperkuat Hak

---



**151.700,78 ha**

Total wilayah adat indikatif



**69.874,14 ha**

Total wilayah adat telah dipetakan



**12.157,98 ha**

Total wilayah adat diakui dan  
disahkan Pemerintah Daerah



**MHA Malalu Kalaguk, Waimon, Segun**

Luas: 2.940,39 Ha

Potensi: Udang

**MHA Aresi, Waimon, Segun**

Luas: 1.806,86 Ha

Potensi: Udang

**MHA Fadan Lamas, Waimon, Segun**

Luas: 2.693,58 Ha

Potensi: Udang

**MHA Igip Klasafit, Waimon, Segun**

Luas: 2.353,24 Ha

Potensi: Udang

**MHA Ndelet/Marga Koso, Klafyo, Konhir**

Luas: 1.540,74 Ha

Potensi: Keladi, sagu dan pisang, babi hutan, kuskus, kayu besi, kayu matoa dan gaharu

**MHA Ndelet/Marga Gisim, Klafyo, Konhir**

Luas: 490,47 Ha

Potensi: Keladi, sagu dan pisang, babi hutan, kuskus, kayu besi, kayu matoa dan gaharu

**MHA Ndelet/Marga Blon, Klafyo, Konhir**

Luas: 332,70 Ha

Potensi: Keladi, sagu dan pisang, babi hutan, kuskus, kayu besi, kayu matoa dan gaharu



# Pemetaan Wilayah Adat untuk Pengakuan Hak

Peta hasil pemetaan partisipatif wilayah adat Nakin Onim Fayas yang telah disepakati bersama margamarga lain. Pemetaan partisipatif merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pengakuan wilayah dari pemerintah.



Pemetaan partisipatif adalah sebuah proses yang panjang. Namun dalam pelaksanaannya, tahapan proses yang panjang itulah yang telah membangun rasa percaya diri dan pemahaman masyarakat adat terkait mengapa proses itu penting dilakukan. Pada pendampingan yang dilakukan EcoNusa, masyarakat terlibat secara langsung, mulai dari membuat sketsa wilayah adat, menyepakati batas antara margamarga, menyusun rencana perjalanan, hingga pengambilan data lapangan dan penyiapan dokumen final. Seluruh rangkaian proses ini diawali dengan sebuah pelatihan sederhana oleh EcoNusa, untuk memastikan masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam prosesnya.

Pada tanggal 18 Januari 2023, Pemerintah Kabupaten Sorong mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat untuk 7 wilayah adat seluas lebih dari 12 ribu hektare. Ini tentu adalah sebuah kabar baik. Namun pada dasarnya, dalam proses pemetaan partisipatif, SK Pengakuan bukanlah target akhir. Hal yang terpenting adalah terbangunnya kesadaran masyarakat adat untuk menjaga dan melindungi hutan di wilayah adatnya masing-masing. Setidaknya, hal ini yang terlihat dari wilayah yang didampingi EcoNusa di Kabupaten Sorong.

Pembatalan perizinan sawit yang telah diinisiasi sejak 2021 lalu, tahun ini sebuah perusahaan kembali datang dan memberi penawaran kerja sama kepada masyarakat adat Malalu Kalaguk

untuk membuka areal perkebunan. MHA Malalu Kalaguk adalah salah satu wilayah adat yang telah dipetakan dan mendapatkan SK Pengakuan. Sebelumnya, pihak perusahaan telah melakukan survei lokasi dan memberi penawaran kerja sama kepada salah satu wilayah adat sebuah marga yang bersebelahan dengan Marga Malalu. Karena berdampingan langsung, maka Marga Malalu turut diberi penawaran.

Hal yang patut diapresiasi adalah penawaran kerja sama tersebut ditolak oleh Masyarakat Adat Malalu. Proses panjang evaluasi perizinan dan pendampingan pemetaan partisipatif untuk menghasilkan SK Pengakuan, telah menyadarkan masyarakat bahwa pembukaan hutan untuk perkebunan sawit pada dasarnya memberikan lebih banyak kerugian ketimbang keuntungan. Tidak hanya itu, jika seandainya masyarakat Malalu menerima perusahaan, hal ini akan berdampak pada rusaknya hutan di beberapa wilayah adat lain. Wilayah Adat Malalu berada di tengah, diapit oleh beberapa wilayah adat lain. Jika perusahaan sawit masuk ke Malalu, maka akses jalan yang merusak hutan harus dibuka.



Ada perusahaan sawit yang datang dan menawarkan kerja sama untuk buka perkebunan di wilayah adat kami. Kami sudah melihat bahwa sawit tidak memberikan manfaat. Sudah banyak contoh. Lahan yang dibutuhkan untuk sawit luas sekali. Sawit masuk, hutan rusak, tapi masyarakat tetap tidak sejahtera. Jadi kami menolak perusahaan sawit. Kami lebih baik budi daya udang saja.



### **Bp Yeskiel Malalu**

Anggota Masyarakat Adat Malalu



# Kolaborasi Mendorong Kebijakan Pro Iklim dan Masyarakat Adat



Keindahan Kampung Malaumkarta di Sorong, Papua Barat Daya. Masyarakat adat di Malaumkarta menerapkan Egek untuk menjaga hutan dan laut mereka.

Advokasi kebijakan dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua dilakukan mulai dari tingkat kampung sampai ke tingkat nasional. Di tingkat kampung, para rohaniawan merupakan salah satu ujung tombak dalam pendampingan masyarakat. Bersama dengan Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua, EcoNusa memfasilitasi pelatihan untuk 30 rohaniawan di wilayah Papua Selatan untuk dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan terkait paralegal dan advokasi.

Di tingkat provinsi, EcoNusa terus melanjutkan proses advokasi untuk beberapa isu kebijakan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dan peningkatan tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit. Terdapat 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di 3 kabupaten di Provinsi Papua (Nabire, Sarmi, dan Keerom) yang sedang dievaluasi dengan luas mencapai kurang lebih 198.000 hektare. Dari hasil evaluasi tersebut, 3 perusahaan yang berlokasi di Nabire dan Keerom telah dicabut dan/atau direvisi izinnya, yang mencakup wilayah seluas kurang lebih 14.000 hektare.

Provinsi Papua telah selesai menyusun dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) dan dokumen tersebut telah didiseminasikan pada Februari 2023. Penyusunan RPRKD ini merupakan tindak lanjut dari ditunjuknya Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi pilot dalam pelaksanaan inisiatif

PPRK. Selanjutnya dokumen RPRKD ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain terkait isu PPRK, berbagai aturan dan kebijakan terkait NEK telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu EcoNusa berinisiatif untuk memfasilitasi dilaksanakannya FGD terbatas untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya. Diskusi tersebut berfokus kepada pembekalan umum terkait perdagangan karbon dengan penekanan kepada peran dan peluang yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dalam skema perdagangan karbon. Diskusi dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pemantapan Kawasan Hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Cabang Dinas Kehutanan.

Untuk memastikan terbangunnya komunikasi dan sinkronisasi antara program kerja Pemerintah Daerah dan para Mitra Pembangunan, telah diadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi perdana yang mempertemukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan para Mitra Pembangunan yang memiliki program kerja di wilayah administrasi Papua Barat Daya pada bulan Oktober.

Pada level nasional, EcoNusa bersama Majelis Ulama Indonesia dan 2 organisasi lainnya berhasil mendorong dikeluarkannya Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Fatwa tersebut memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, badan legislatif, lembaga pendidikan, pelaku bisnis, tokoh agama, serta masyarakat luas terkait krisis iklim. Di dalam Fatwa tersebut dinyatakan bahwa segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram.



Peluncuran Fatwa MUI No.86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. EcoNusa menjadi salah satu LSM pengusul fatwa tersebut.



Penanaman mangrove kolaborasi antara Penjaga Laut dan Aksi Kita sebagai bagian dari Aksi Muda Jaga Iklim 2023.

An aerial photograph showing a flooded area with several trees and a white text box overlaid on the right side. The water is a light blue-grey color, and the trees are green. The text box contains the title 'BAB 3: Pemuda Penggerak Aksi' in bold, dark green font.

# **BAB 3:**

## **Pemuda Penggerak Aksi**

# Aksi Muda Jaga Iklim (AMJI)

## Peserta Aksi



**29.000 orang**

Anak muda terlibat



**119 komunitas**

Sebagai kolaborator



**519 titik**

Lokasi aksi di seluruh Indonesia

## Event

**School of  
EcoDiplomacy (SED)  
Nasional**

91 orang peserta

**Sail to Campus (STC)**

578 siswa sebagai peserta  
dari 3 universitas

**Kemah Pemuda**

104 peserta dari 6 kota

## Hasil Aksi



**13.928 bibit**

Pohon & mangrove  
ditanam



**180 anakan**

Terumbu karang  
ditransplantasi



**7.558 kg**

Sampah plastik diangkat

# EcoDefender

EcoDefender sebagai penggerak utama program melakukan MoU bersama UNIMUDA untuk menggerakkan program pariwisata berbasis kampung di Mibi dengan melibatkan kelompok perempuan

EcoDefender menjadi mitra kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di Manokwari

EcoDefender melibatkan 28 anak muda melakukan penyulaman di Kawasan Cagar Alam (CA) Cycloop dan menyulam 800 pohon

EcoDefender menginisiasi Program Balik Kampung – kampung Mosso di perbatasan Indonesia-PNG untuk memberikan pelajaran tambahan bagi anak – anak TK dan SD tentang membaca, menulis, dan menghitung

EcoDefender melakukan pendekatan keagamaan dalam menyuarakan isu lingkungan untuk anak – anak di wilayah kampung Mibi melalui program “Literasi – Literasi”

EcoDefender menginisiasi pelatihan pertanian organik untuk kelompok perempuan Kampung Mibi

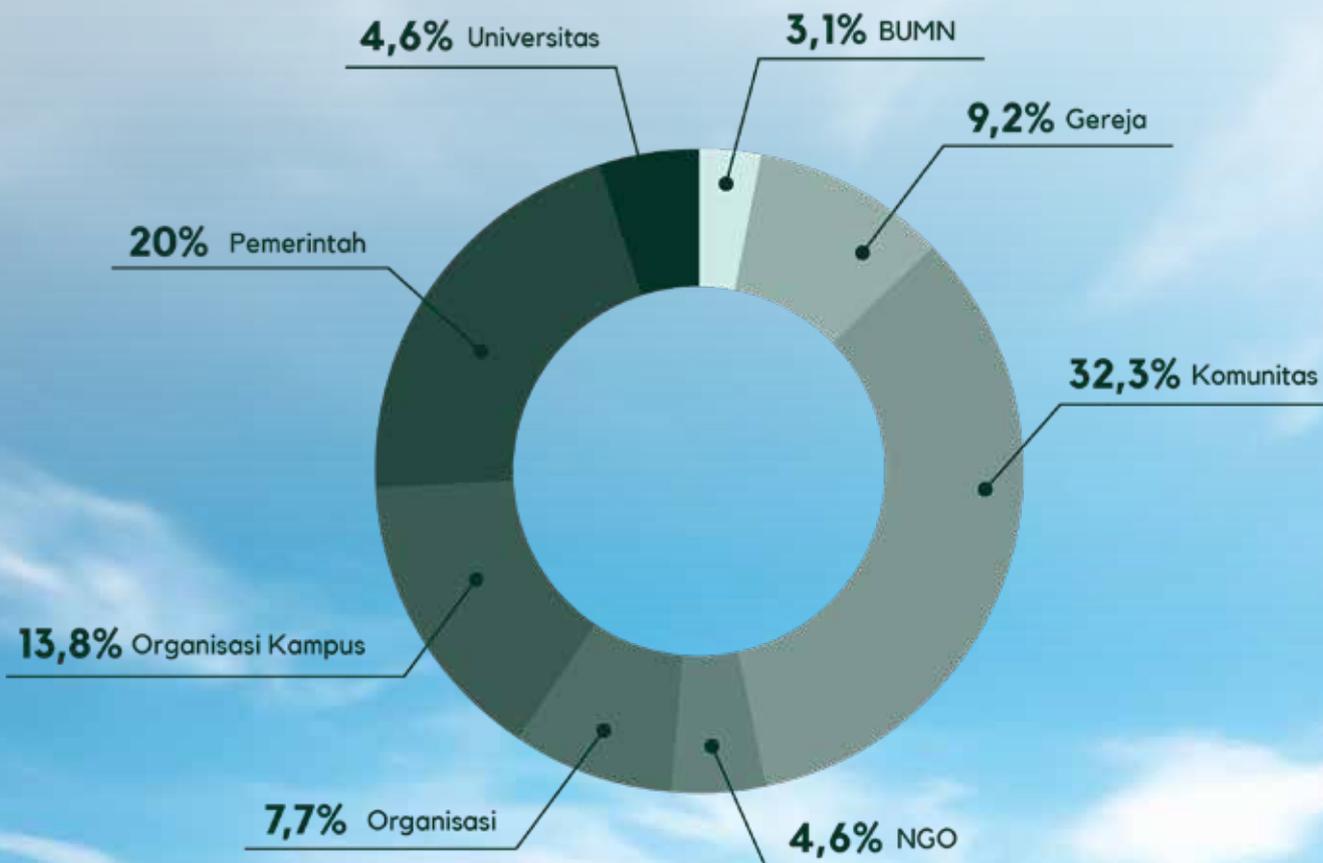
EcoDefender menginisiasi pelaksanaan kegiatan Kemah Pemuda di Ambon dan Merauke

EcoDefender menginisiasi penanaman mangrove di sejumlah titik

Estuaria, Kemah Pemuda di Ternate, Maluku Utara



# Kolaborator dan Mitra EcoDefender



Anggota Pramuka membersihkan pantai dari sampah sebagai bagian dari gerakan Aksi Muda Jaga Iklim 2023.

# Lencana Mangrove untuk Gerakan Pramuka

Pada November 2023, EcoNusa berkolaborasi dengan Kwarnas Pramuka melakukan peluncuran lencana mangrove (mangrove badge). Inisiatif ini dibuat dengan semangat untuk lebih memperkenalkan mangrove, termasuk manfaat dan potensinya dalam upaya perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Selain itu, untuk menekankan pentingnya generasi muda untuk mengambil peran dalam upaya mitigasi dampak perubahan iklim melalui inisiatif perlindungan dan pelestarian mangrove.

Di Indonesia, Gerakan Pramuka memiliki anggota sebanyak kurang lebih 25 juta orang. Ada harapan besar bahwa peluncuran lencana mangrove ini beserta pesan-pesan yang disampaikannya bisa menjangkau seluruh anggota Pramuka. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan sehingga EcoNusa menginisiasi kolaborasi dengan Kwarnas Pramuka. EcoNusa menyadari bahwa masa depan perlindungan lingkungan di Indonesia ada di

tangan anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, kolaborasi dengan Kwarnas Pramuka cukup potensial dalam menjangkau anak-anak muda.

Setelah diperkenalkan kepada para anggota Pramuka di Ambon, Maluku, lencana mangrove kemudian disosialisasikan kepada para anggota Pramuka Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi di Bumi Perkemahan Cibubur. Peluncuran ini merupakan tahap awal untuk memperkenalkan mangrove secara lebih meluas di kalangan anak muda. Pada dasarnya, ada cita-cita yang lebih besar dari EcoNusa di masa yang akan datang. Lencana mangrove ini rencananya akan diperkenalkan pada skala internasional, yang akan dimulai pada sebuah program internasional pada 2025 mendatang, *Earth Tribe Challenges*. Ada harapan bahwa upaya sosialisasi potensi dan upaya perlindungan mangrove tidak hanya dilakukan di level nasional, melainkan juga hingga ke internasional.



Para anggota Pramuka, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso, dan CEO EcoNusa Bustar Maitar di acara *Workshop Mangrove Badge Challenge*.



Tanah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di perairannya.

An aerial photograph of a tropical coastline. In the foreground, there is a shallow, clear turquoise lagoon with a visible coral reef. The water transitions to a deeper blue as it meets a bay. A large, lush green island with dense forest is situated in the middle ground, surrounded by water. In the background, the ocean extends to the horizon under a bright blue sky with scattered white clouds.

# **BAB 4:**

## **Kampanye Digital**

## Digital Campaign



**388.261 pengikut**

Pengikut baru di 6 kanal media sosial



**18.193 pengunjung/bulan**

**30.206 halaman dibaca/bulan**

Pengunjung website setiap bulan



**2.316**

Konten dipublikasikan



**IDR 35.988.166.498**

Total nilai PR value



# Tetap Konsisten Menyiarkan Narasi Positif tentang Indonesia Timur



Narasi positif tentang Indonesia Timur terus kami sebarkan melalui berbagai kanal digital EcoNusa. Upaya difokuskan untuk merumuskan *unique selling proposition* yang membedakan EcoNusa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya dan mengenali audiens yang berbeda pada setiap saluran komunikasi EcoNusa. Jika saluran media sosial EcoNusa adalah figur manusia, para pengikut media sosial EcoNusa bisa membayangkan EcoNusa sebagai seorang pemuda Papua yang terdidik, cerdas, memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tetap memiliki cinta terhadap alam, budaya, dan tradisi. EcoNusa juga menampilkan pemuda Papua sebagai komunikator utama dalam saluran media sosial mereka. Meskipun konten di media sosial dibuat dalam format yang lebih ringan, namun tetap kuat dalam pesan konservasi dan edukasi yang disampaikan.

Cara ini berhasil menyumbang *traffic* yang signifikan. Beberapa konten dengan penyumbang *traffic* tertinggi adalah “Koba-Koba” dan “Teh Moi Kamlowele”. Kedua konten tersebut menyajikan tentang budaya di Tanah Papua yang diceritakan langsung oleh masyarakat adat. Koba-koba menceritakan tentang payung tradisional dari Papua. Konten tersebut bahkan diberitakan oleh *therakyatpost.com*, sebuah media online dari Malaysia. Sedangkan “Teh Moi Kamlowele” menceritakan tentang teh kayu dari Tanah Papua. Konten ini di-repost oleh sebuah akun aggregator besar. Tingginya angka digital konten-konten

tersebut secara langsung menambah *followers* di masing-masing *channel*. Dengan adanya konten yang dibagikan ulang oleh media dan aggregator besar tentunya semakin banyak netizen yang terpapar oleh narasi positif tersebut.

Di luar itu, EcoNusa juga berkolaborasi dengan media massa. Kami bekerja sama dengan *Society of Environmental Journalists* (SEJ), EcoNusa mendorong para jurnalis untuk lebih banyak mempublikasikan berita lingkungan hidup di media mereka melalui kegiatan peningkatan kapasitas. Pada 2023, bersama SEJ, kami menyelenggarakan *Journalist Fellowship* dengan topik: "Masyarakat Pesisir, Kelautan, dan Dampak Perubahan Iklim di Indonesia Timur." Tujuan dari kegiatan ini

adalah untuk mendukung publikasi berbagai karya jurnalistik dalam bentuk video mengenai: pengelolaan perikanan berkelanjutan, peran perempuan dalam perikanan pesisir, pengelolaan perikanan, dan kawasan berbasis komunitas.

Kami juga kembali berkolaborasi dengan *Kompas*, sebuah surat kabar nasional terkemuka di Indonesia, dengan topik Ekspedisi Laut. Dalam ekspedisi ini, tim yang terdiri dari jurnalis-jurnalis berbakat berlayar melintasi berbagai lokasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku untuk meliput berbagai permasalahan masyarakat pesisir. Selama tiga hari, pemberitaan tentang mereka dikumpulkan di halaman-halaman utama *Kompas*.

### Solidaritas Dunia untuk Palestina Makin Bergema

Massa di Indonesia dan berbagai negara menyuarakan dukungan untuk Palestina. Mereka juga minta Israel menghentikan serangan ke Tepi Barat dan Jalur Gaza.

JAKARTA, KOMPAS — Massa dari berbagai negara menyuarakan solidaritas dengan Palestina di berbagai negara. Mereka juga meminta Israel menghentikan serangan ke Tepi Barat dan Jalur Gaza.

### Perikanan Tangkap Masa Depan Lumbung Ikan Terancam

ANWAR USMAN — Hingga saat ini, perikanan tangkap masih dianggap sebagai sumber protein yang penting. Namun, tantangan yang dihadapi perikanan tangkap di masa depan semakin kompleks.

### Perairan Halmahera Tercemar Logam Berat

Hasil pengujian air laut menunjukkan kandungan sejumlah logam berat melebihi ambang batas sehingga mengancam biota laut. Eksploitasi dan pengolahan bijih nikel oleh sejumlah perusahaan diduga menjadi penyebab.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah lokasi di perairan Halmahera, Maluku Utara, tercemar logam berat akibat penambangan dan pengolahan bijih nikel oleh sejumlah perusahaan di provinsi tersebut.

### Anwar Usman Dicotot, Syarat Batas Usia Diuji Lagi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menajutikan sanksi uji kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari posisi ketua MK. Rabu (8/11/2023) ini, MK akan menggelar sidang pendahuluan uji materi pasal soal syarat batas usia capres dan cawapres.

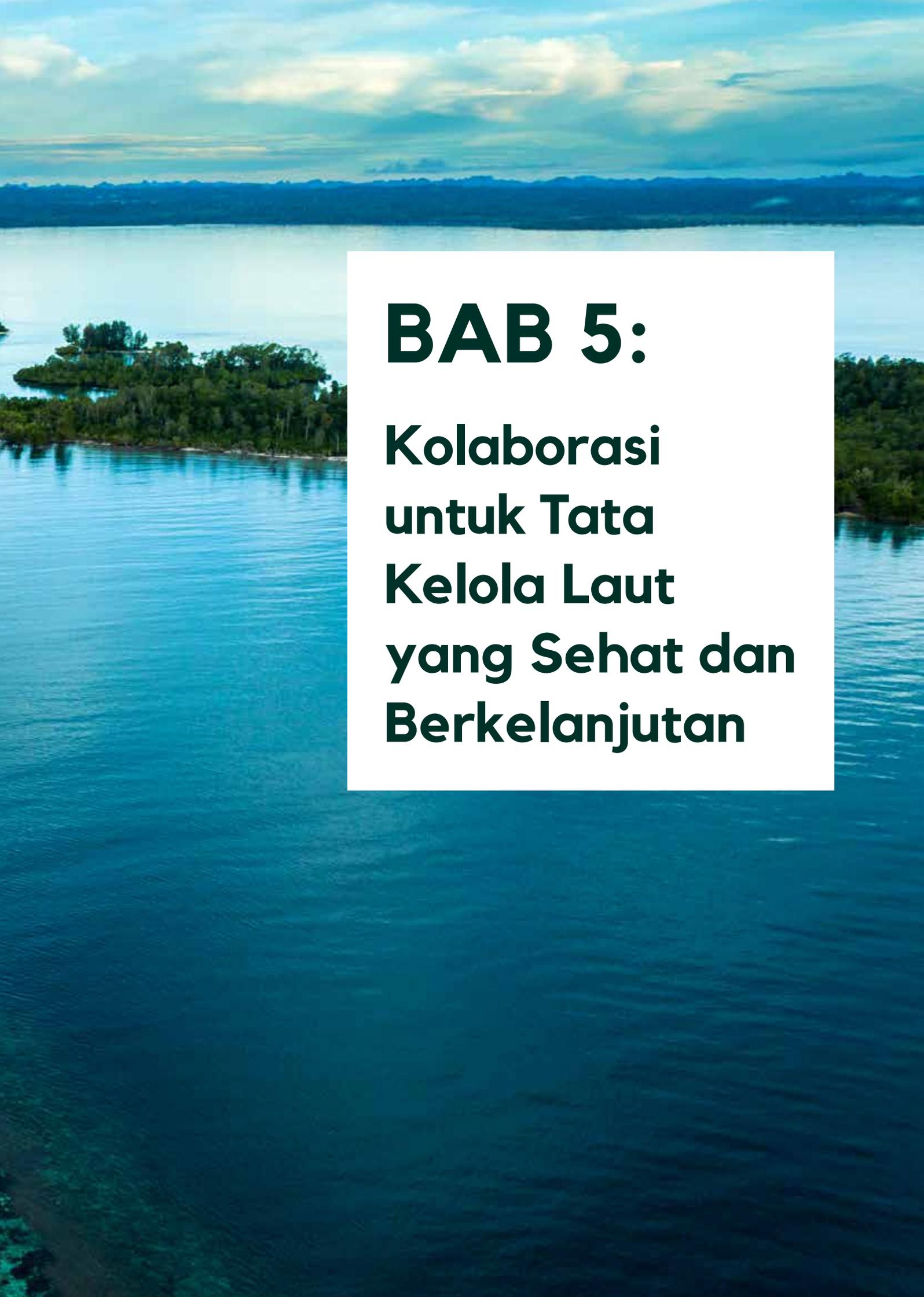
JAKARTA, KOMPAS — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pendahuluan uji materi pasal soal syarat batas usia capres dan cawapres.

Hutan mangrove di Kampung Waimon, Sorong.  
Mangrove adalah ekosistem penting untuk iklim  
dan tempat udang berkembang biak dengan baik.





Salah satu pulau kecil di Tanah Papua. Indonesia memiliki ribuan pulau kecil yang rawan tenggelam akibat krisis iklim.



# **BAB 5:**

## **Kolaborasi untuk Tata Kelola Laut yang Sehat dan Berkelanjutan**

# Inisiatif Penelitian

---



**17 orang**

peneliti muda didukung



**9 dokumen**

hasil penelitian sebagai  
bahan advokasi



**8 kampus**

mitra dalam peneliti

Perairan Kepulauan Maluku kaya akan sumber daya perikanan. Kekayaan tersebut membuat Pemerintah Indonesia pada 2010 menggagas Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

# Kolaborasi Riset untuk Mendukung Kebijakan Perikanan Berbasis Bukti



EcoNusa mendorong peneliti-peneliti muda dari berbagai universitas di Kawasan Indonesia Timur untuk berkontribusi dalam penelitian sebagai bahan advokasi kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan. Sepanjang 2023, EcoNusa mendukung sebanyak 17 peneliti dari beberapa universitas di Papua dan Maluku. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong para peneliti untuk terjun ke dunia penelitian dalam rangka mendorong dihasilkannya rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

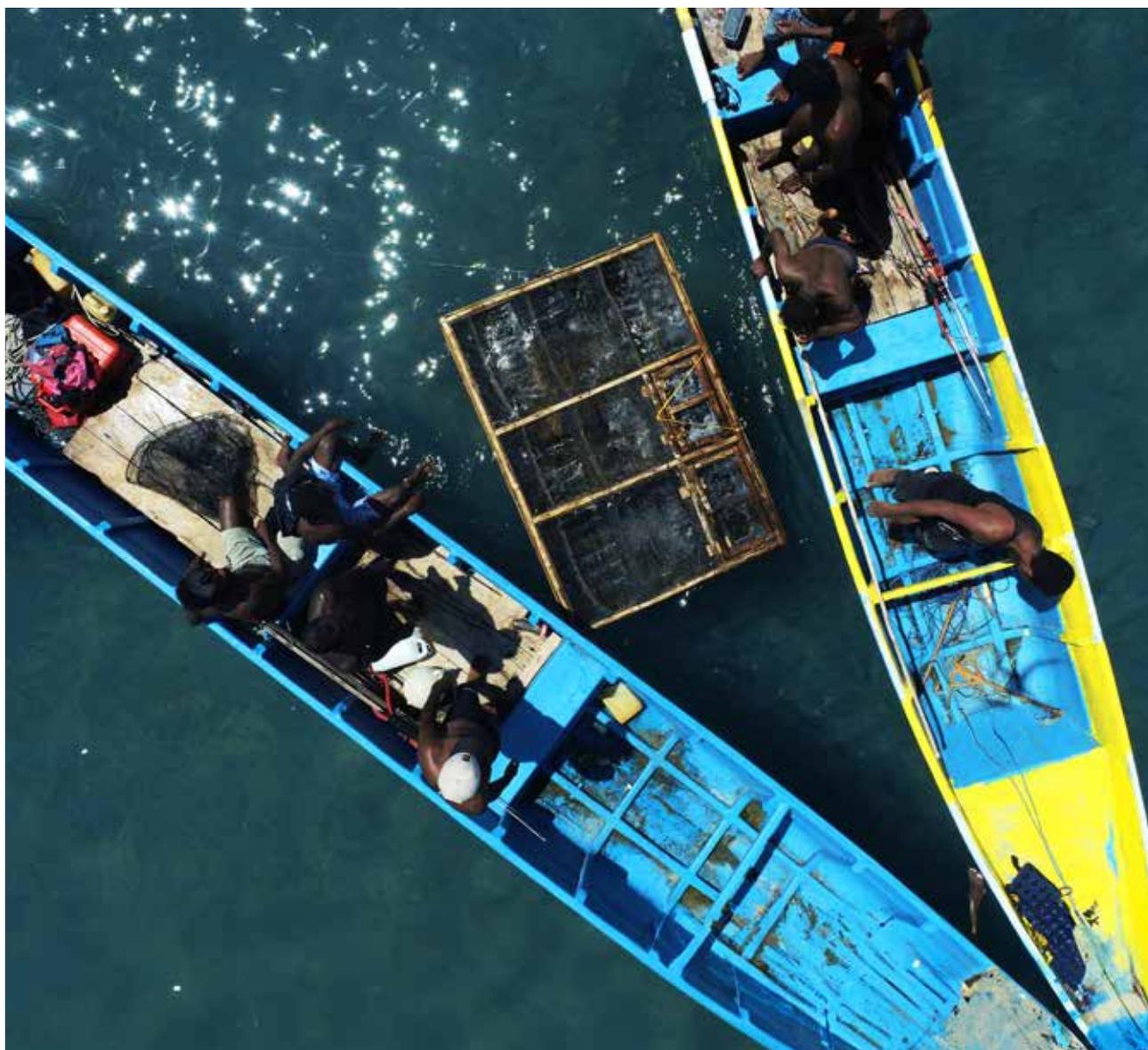
Dari keseluruhan hasil riset tersebut, beberapa poin penting yang dapat menjadi bahan pelajaran adalah kontribusi signifikan perikanan yang ditopang oleh pelaku perikanan skala kecil, menguatnya inisiatif masyarakat tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan lestari, perbaikan pengelolaan tuna dan pentingnya pembenahan partisipasi masyarakat kepulauan dalam perencanaan sebuah kebijakan.

Saiful, S.Pi, M.Si, peneliti dari Universitas Pattimura dalam menanggapi inisiatif kolaborasi riset ini mengatakan, “Kolaborasi EcoNusa dan Universitas Pattimura muncul dan dikembangkan secara adaptif bersama dengan kami untuk merespon adanya kompleksitas terkait masalah

publik. Kolaborasi yang digagas oleh Ocean Program EcoNusa ini merupakan energi positif dan wujud nyata kepedulian dalam menyikapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.”

Riset kolaboratif yang dilakukan oleh Saiful adalah mengenai persepsi masyarakat perikanan skala kecil (*small scale fisheries*) terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Dua temuan penting dari riset tersebut adalah *pertama*, rendahnya tingkat penerimaan masyarakat atas rencana kebijakan penangkapan ikan terukur di

mana sebanyak 70% masyarakat tidak setuju dan 30% masyarakat yang setuju. Rendahnya tingkat penerimaan rencana kebijakan penangkapan terukur tentunya memiliki pengaruh terhadap efektifitas kebijakan itu sendiri. *Kedua*, dengan mengaplikasikan pendekatan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) terhadap strategi pengelolaan perikanan skala kecil, kunci perbaikan adalah penguatan kelembagaan tata kelola perikanan melalui *co-management*. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat akses informasi atas berbagai kebijakan yang sedang disusun dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.



# Komitmen Pelindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



**E**coNusa berjuang bersama masyarakat melalui Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan yang berkelanjutan (KORAL) dengan menjadi Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam kasus gugatan uji materi (judicial review) pasal perlindungan pulau kecil. Gugatan atas UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) ini dilayangkan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), salah satu perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Wawonii, Sulawesi Tenggara. Kemenangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil ditandai dengan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi tersebut.

Sepanjang 2023, EcoNusa bersama Koalisi Jaringan Nusa berupaya memperkuat perlindungan

ekosistem laut dan pesisir di level regional dan nasional. Gerakan kolaboratif ini digagas untuk menjembatani isu kelautan dan perikanan. EcoNusa berkolaborasi bersama Jaringan Nusa untuk memetakan isu pengelolaan laut dan perikanan tangkap.

Beranggotakan 18 CSO dan koalisi masyarakat pesisir dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, Jaringan Nusa telah mengelola pertukaran informasi dan isu kunci atau kebijakan terbaru, mendukung lembaga-lembaga lokal, aktivis perempuan dan pemimpin lokal untuk merawat pengetahuan kritis dan menyuarakan pandangan komunitas melalui dialog kebijakan, advokasi, kampanye publik serta mendorong penyusunan aturan desa terkait pembenahan partisipasi masyarakat pesisir.

# Anggota Jaring Nusa



EcoNusa juga memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/ Lembaga untuk advokasi perlindungan Pulau Sangihe (Sulawesi Utara), mendukung perlindungan Pulau Wawonii (Sulawesi Tenggara) serta mendorong pembatalan pelelangan Pulau Widi (Maluku).

EcoNusa bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemangku kepentingan lainnya telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045. EcoNusa turut menyumbangkan gagasan pengelolaan pemanfaatan ruang laut secara komunal oleh masyarakat pesisir dan masyarakat adat setempat dalam upaya perwujudan Ekonomi Biru di Indonesia. Dokumen tersebut telah resmi

diluncurkan pada acara ASEAN Blue Economy Forum 2023 di Tanjung Pandan, Bangka Belitung pada 3 Juli 2023.

Untuk memperkuat jejaring di kalangan akademisi, EcoNusa juga bekerja sama dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) dalam menyusun beberapa rekomendasi kebijakan kelautan dan perikanan, salah satunya Skenario Laut 2045. Penyusunan Skenario Laut 2045 bertujuan untuk menjawab tantangan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan, pemanfaatan sumber daya kelautan, dan tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

Keindahan Pulau Rhun di Kepulauan Banda, Maluku. Karena berharganya pala, dulu Rhun pernah ditukar dengan Manhattan, New York oleh Inggris dan Belanda.



Seorang mama memisahkan fuli (bunga pala) dari biji pala saat panen pala di Ambon, Maluku. Bunga pala di antaranya dibutuhkan dunia industri dengan produk olahan, seperti makanan, minuman, obat, parfum, bahan pengawet, obat bius, dan bumbu.





# **BAB 6:**

**Memperkuat  
Nilai Produk  
Masyarakat  
Adat untuk  
Kemadirian  
Ekonomi Lokal**

# Komoditi



**12**

Koperasi Mitra Utama



**31**

Kampung / Desa Dilibatkan  
di Tahun 2023



**4.650**

Petani dan Nelayan Masyarakat  
Adat Terlibat Langsung



**136 ton**

Total Sourcing Komoditas



**82,6 ton**

Total Penjualan Pala



**1,6 ton**

Total Penjualan Udang



**406,1 ha**

Luasan Lahan Perkebunan  
Rempah Milik Masyarakat



**76,097 ha**

Mangrove Terjaga di Kabupaten  
Sorong dan Sorong Selatan



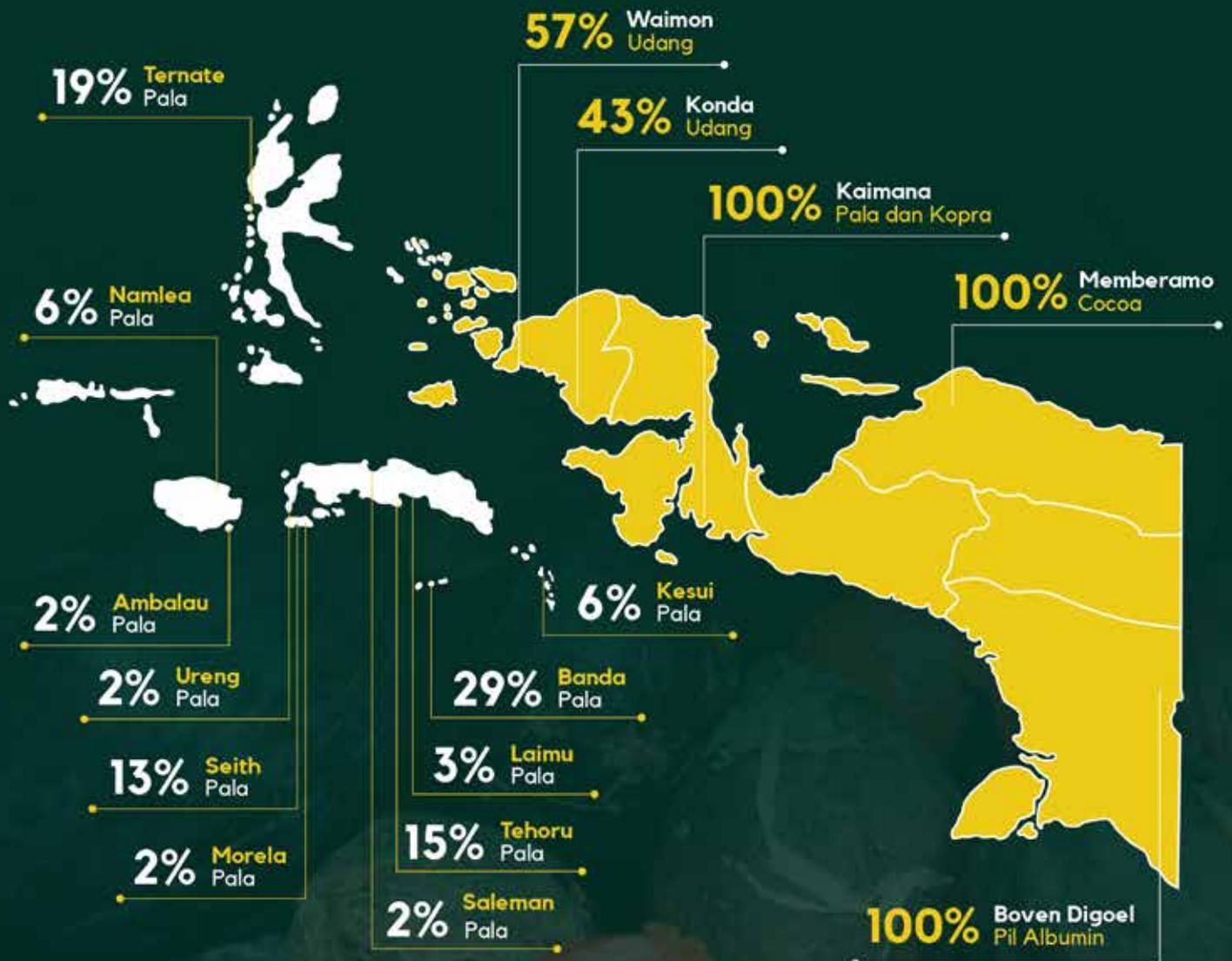
**13.960.986 ton CO<sup>2</sup>**

Terjaga di Hutan Mangrove dan Kebun Rempah Masyarakat

Pemuda Kampung Waimon menunjukkan udang banana hasil tangkapannya. Perairan Waimon yang terletak di Sorong dikenal memiliki potensi udang banana yang melimpah.



# Persentase sourcing komoditi berdasarkan daerah asal



# Menumbuhkan Literasi Keuangan Masyarakat Adat

Dua nelayan dari Kampung Waimon menarik jaring untuk menangkap udang. Hasil tangkapan tersebut dijual ke Koperasi Keik Boson Kamwaris.



**B**agi para nelayan penangkap udang di Kampung Waimon, memiliki uang tunai dari hasil penjualan udang dianggap sebagai sebuah kemewahan. Karena, kenyataannya, uang yang diperoleh dari penjualan udang seringkali hanya cukup untuk membayar hutang kepada pedagang pengumpul. Sulitnya memasarkan hasil tangkapan membuat para nelayan bergantung kepada tengkulak. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, para nelayan seringkali terpaksa meminjam uang pada tengkulak dengan perjanjian bahwa hutang tersebut akan dibayar dengan udang hasil tangkapan.

Minimnya pengetahuan literasi keuangan di kalangan nelayan membuat mereka tidak pernah tahu secara pasti berapa pendapatan diperoleh setiap harinya. Mereka hanya mengetahui bahwa harga setiap kilogram udang yang mereka jual kepada tengkulak digunakan untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sisanya, jika ada, biasanya diberikan dalam bentuk kupon. Kupon tersebut kemudian dapat ditukar dengan bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka nyaris tidak pernah mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan udang.

Praktik ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Dampaknya, nelayan kesulitan untuk membawa pulang uang tunai yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk kebutuhan di luar bahan makanan pokok, seperti biaya sekolah dan berobat, mereka seringkali harus kembali berhutang. Dan skema seperti ini pun akan terus terjadi berulang-ulang. Nelayan tidak

memiliki pilihan lain. Sebab, jika ingin menjual hasil tangkapan udang langsung ke pasar atau ke kota, nelayan harus menempuh perjalanan dengan mobil selama sekitar 3 jam, dengan biaya sewa sebesar Rp 4 juta sekali jalan.

Pada tahun 2023, EcoNusa memfasilitasi pembentukan koperasi dan membangun sebuah rumah timbang udang di Kampung Waimon. Koperasi ini terdiri dari para nelayan dan bertujuan menjadi wadah untuk penjualan udang mereka. Selain itu, koperasi ini juga dapat memberikan pinjaman kepada nelayan yang membutuhkan. Rumah timbang tersebut dijadikan sebagai tempat penampungan udang-udang segar. Kemudian, koperasi menjual udang hasil tangkapan nelayan kepada PT KOBUMI, untuk selanjutnya dipasarkan secara lebih luas, baik untuk pasar lokal maupun nasional.

Koperasi membeli dari nelayan dengan sistem pembayaran langsung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, koperasi menyiapkan kios yang menjual keperluan rumah tangga, seperti bahan makanan. Dengan demikian, nelayan yang menjual udang ke rumah timbang bisa langsung membelanjakan hasil penjualan sesuai kebutuhan masing-masing.



Sekarang kami bisa memperbaiki perahu. Kami juga bisa membeli kebutuhan lain seperti alat komunikasi. Karena kami jual udang sudah bisa dibayar langsung. Jadi sudah bisa belajar kelola uang sendiri. Di samping itu ada koperasi yang memberikan pemahaman kepada kami terkait pentingnya mengelola keuangan dan bisa memfasilitasi untuk simpan-pinjam. Pada akhirnya, keuntungan dari koperasi juga akan kembali lagi kepada kami sebagai anggota.



**Dino Aresi**

Nelayan Kampung Waimon





Salah satu homestay di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang rusak saat pandemi Covid-19 dan mendapatkan bantuan pendanaan ecofund.



# **BAB 7:**

## **EcoFund & Mitra Kolaborator**

# ECOFUND



**9 unit**

Homestay



**IDR 310.000.000**

Dana bergulir disalurkan



Homestay di Raja Ampat umumnya dimiliki oleh orang asli Papua. Masyarakat menjaga laut dan hutan mereka yang menjadi daya tarik wisata.



# Aktivitas Ekonomi Kembali Menggeliat di Batanta

Tahun ini merupakan tahun ketiga EcoNusa menyalurkan dana bergulir untuk pemilik usaha *homestay* di Distrik Batanta dan Waigeo, Kabupaten Raja Ampat. Kampung ini dipilih dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat di sana. Masyarakat di kampung-kampung ini menggantungkan sumber mata pencaharian dari wisata. Namun pada masa Pandemi Covid-19 di 2020, industri pariwisata mati suri, *homestay* tidak menerima tamu sama sekali. Akibatnya, sumber mata pencaharian masyarakat hilang.

Ketika pandemi mereda dan pariwisata mulai menggeliat kembali, *homestay-homestay* yang ada sudah terlanjur rusak dan tidak layak dipergunakan kembali. Atas dasar inilah EcoNusa berinisiatif memberikan bantuan dana bergulir kepada kelompok pengelola *homestay* untuk kebutuhan renovasi.

Kini, *homestay-homestay* yang ada sudah dapat beroperasi lagi. Aktivitas perekonomian, khususnya di Batanta, sudah mulai menggeliat kembali. Tak hanya itu, beroperasinya *homestay-homestay* ini kembali, telah menciptakan rantai ekonomi yang saling menghidupi antara kelompok pengelola *homestay* dan kelompok pertanian organik. Sama halnya dengan kasus *homestay*, pada waktu yang bersamaan, EcoNusa juga memberikan pendampingan pengelolaan pertanian organik untuk kelompok-kelompok perempuan di Batanta. Saat ini, kelompok pertanian ini berperan menjadi *supplier* sayuran ke *homestay-homestay*.

Selain itu, nelayan-nelayan lokal juga menyediakan kebutuhan ikan.

Batanta adalah sebuah kampung yang unik dan strategis. Tidak seperti pulau lainnya yang dominan dengan tanah berpasir, pulau ini memiliki tanah yang potensial untuk pertanian. Potensi wisata yang besar membuat banyak investor yang datang ke sekitar pulau ini. Saat ini, Pulau Batanta diapit oleh 5 *resort* mewah dan sebuah perusahaan *seafood* yang besar. Pada dasarnya, masyarakat sekitar juga turut diuntungkan dengan terbukanya lapangan kerja. Namun di sisi lain, kehadiran kelompok *homestay* ini juga merupakan sebuah langkah untuk melawan dan menunjukkan kemandirian ekonomi untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah meski dengan modal terbatas.

Hal yang menggembirakan lainnya, Program EcoFund ini juga telah meningkatkan pemahaman masyarakat setempat akan literasi keuangan dan pentingnya kemandirian. Maka, pada momen Musyawarah Kampung (Muskam) yang diselenggarakan pada awal 2024, masyarakat mengusulkan agar ada alokasi dana kampung untuk mendukung pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat untuk memastikan inisiatif EcoFund dari EcoNusa tetap berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat untuk mengangkat hal ini dalam Muskam, tidak terlepas dari strategi yang dijalankan EcoNusa. Sejak awal, EcoNusa telah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparat pemerintahan desa. Program ini dijalankan

dengan prinsip keterbukaan. Dengan demikian, masyarakat setempat dan aparat pemerintahan desa telah memahami mengapa program ini penting bagi masyarakat. Di sisi lain, skema dana bergulir dipilih daripada bantuan langsung, sebagai strategi untuk membangun kemandirian dan pemahaman tentang bisnis berkelanjutan. Pada dasarnya, ketika ada pengembalian dana dari kelompok, dana tersebut akan disalurkan kembali kepada kelompok lain yang juga membutuhkan.



“

Terima kasih telah mendukung kami untuk meningkatkan perekonomian. Dengan adanya kepastian ekonomi, kami bisa tetap menjaga hutan dan laut untuk keberlangsungan Papua.

”

**Musa Omkarsba**  
Penerima EcoFund



# Kolaborator

**16 lembaga**

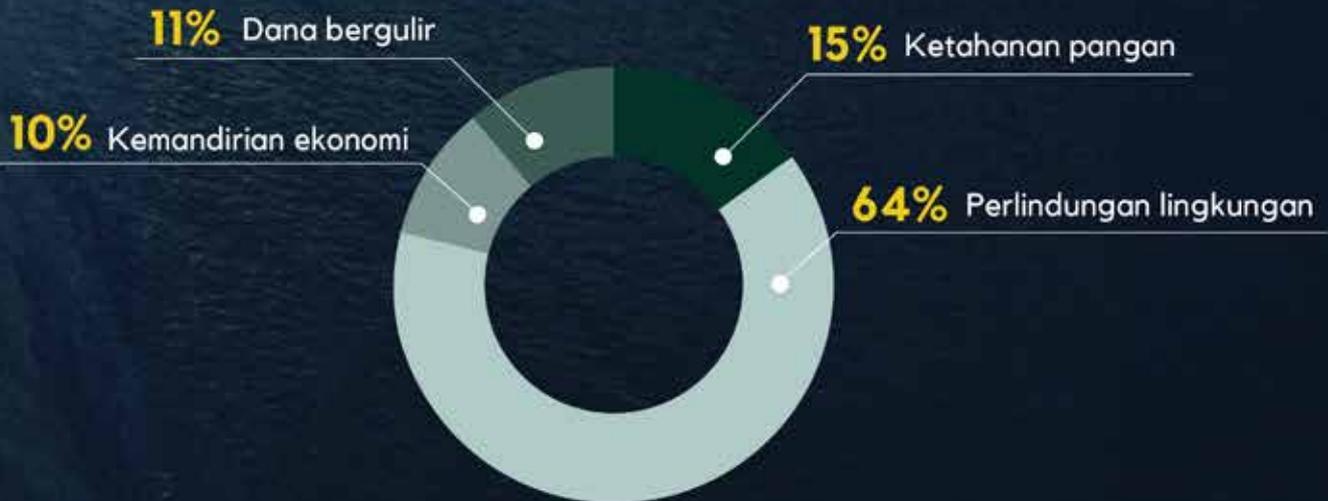
sebagai kolaborator

**IDR 2.827.830.000**

dana program disalurkan



## Alokasi Pendanaan Kolaborator Berdasarkan Program



# Ayam Petelur untuk Pangan, Pil Albumin untuk Kemandirian Ekonomi Masyarakat Papua Selatan

**K**olaborasi yang dibangun bersama lembaga-lembaga lokal telah membuktikan bahwa perubahan tidak hanya bisa diciptakan oleh EcoNusa sendiri. Pendampingan yang diinisiasi oleh mitra, memperlihatkan hasil dan dampak yang bisa dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Di Kampung Kaptel Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, Persekutuan Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua di Wilayah Papua Selatan, menginisiasi pengembangan peternakan ayam petelur. Saat ini terbentuk 1 unit kelompok dengan jumlah anggota 10 orang. Saat ini, ternak ayam yang dikelola berjumlah 100 ekor dan menghasilkan telur 100 butir per hari. Dengan tersedianya peternakan di dalam kampung, maka harganya pun turun. Kini, untuk setiap Rp 5 ribu rupiah, masyarakat bisa memperoleh 3 butir telur.

Kampung Kaptel terletak di Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke. Untuk sampai ke kampung ini, dibutuhkan perjalanan dengan mobil selama lebih dari 3 jam dari Kota Merauke. Perjalanan kemudian akan dilanjutkan dengan perahu motor (*long boat*) selama kurang lebih 3 jam. Biaya sewa perahu mencapai Rp 4-5 juta. Karena itu, untuk perjalanan ke Kota Merauke, biasanya masyarakat akan berangkat bersama-sama sesuai kebutuhan masing-masing untuk menghemat biaya.

Bagi Masyarakat Kampung Kaptel, sebutir telur ayam cukup berharga. Telur ayam adalah satu-

satunya sumber protein yang mampu dijangkau masyarakat dengan mudah. Namun, harganya pun terbilang mahal, sebutir dijual seharga Rp 5 ribu. Hal ini wajar, mengingat telur ayam untuk konsumsi masyarakat harus didatangkan dari Kota Merauke.

Cerita pendampingan ini pada dasarnya tidak sesederhana menyediakan sebutir telur untuk konsumsi sehari-hari masyarakat Kaptel. Di luar itu, Kabupaten Merauke secara umum, termasuk Kampung Kaptel, sedang menghadapi permasalahan kesehatan anak. Kabupaten Merauke termasuk ke dalam salah satu kabupaten dengan angka *stunting* tertinggi di Indonesia. Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mencatatkan, selama 2022, sebanyak 2.015 anak di Kabupaten Merauke mengalami *stunting*, yang dilaporkan oleh sebanyak 25 Puskesmas. Dari data ini, sebanyak 37 orang berasal dari Kampung Kaptel. Atas keprihatinan ini, GPI menginisiasi budi daya ayam petelur sebagai salah satu sumber gizi alternatif dengan harga terjangkau. Dengan adanya budi daya ayam petelur di dalam kampung, maka masyarakat tidak perlu lagi menunggu persediaan telur dari Kabupaten Merauke untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Inisiatif ini kemudian mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Distrik Kaptel. Pemerintah Distrik menggandeng kelompok ayam petelur ini untuk mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan gizi, dalam rangka menurunkan angka

*stunting*. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Distrik melakukan membeli seluruh produksi yang dihasilkan kelompok ini untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Distrik menyediakan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas bagi kelompok.

Sementara itu, di Kabupaten Boven Digoel, salah satu kolaborator lain, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Boven Digoel mengembangkan inisiatif produksi kapsul albumin dengan memanfaatkan potensi ikan gabus yang cukup besar di daerah tersebut.

Sebagai sebuah wilayah dengan banyak area rawa dan sungai, ikan gabus liar melimpah di Merauke. Ikan yang disebut Gabus Toraja ini bahkan menjadi predator yang memangsa ikan-ikan kecil yang biasanya dikonsumsi warga. Sebelumnya, warga hanya memancing secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari atau diolah menjadi abon. Namun karena melihat perkembangan yang cukup masif, masyarakat dengan didampingi KPH Boven Digoel kemudian mulai memikirkan sebuah inisiatif pemanfaatan dan pengolahan.

KPH Boven Digoel melalui dukungan dari EcoNusa kemudian mulai berinisiatif

mendampingi masyarakat dalam membuat olahan pil albumin. Selain potensi manfaat pil albumin yang cukup besar, dari aspek ekonomi juga dinilai sangat potensial sebagai salah satu sumber mata pencaharian berkelanjutan, mengingat harganya yang relatif tinggi di pasaran. Berdasarkan hasil analisis potensi bisnis, setiap botol pil albumin dipasarkan seharga Rp 1 juta atau 10 kali lipat dari biaya produksi.

Saat ini, terdapat 3 kelompok pengolahan yang didampingi KPH Boven Digoel. Selain kelompok pengolahan pil albumin, terdapat dua kelompok pengolahan minyak lawang dan abon ikan. Setiap kelompok berisikan 10 orang anggota. Untuk kelompok pil albumin sendiri, setiap produksi mampu menghasilkan 50 botol pil albumin. Biasanya produksi dilakukan satu kali dalam sebulan. Kelompok saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi dari BPOM Merauke. Sementara untuk pemasaran, akan difasilitasi oleh EcoNusa melalui Galeri KOBUMI. Sebelumnya, kelompok ini telah melakukan uji coba produksi. Namun untuk memastikan pemasaran secara lebih meluas, EcoNusa memfasilitasi pengurusan sertifikasi BPOM.





# **BAB 8:**

## **Operasional, Keuangan, & Sumber Daya Manusia**

# Anggaran Dikelola



**IDR 68,2 Miliar**

Realisasi anggaran

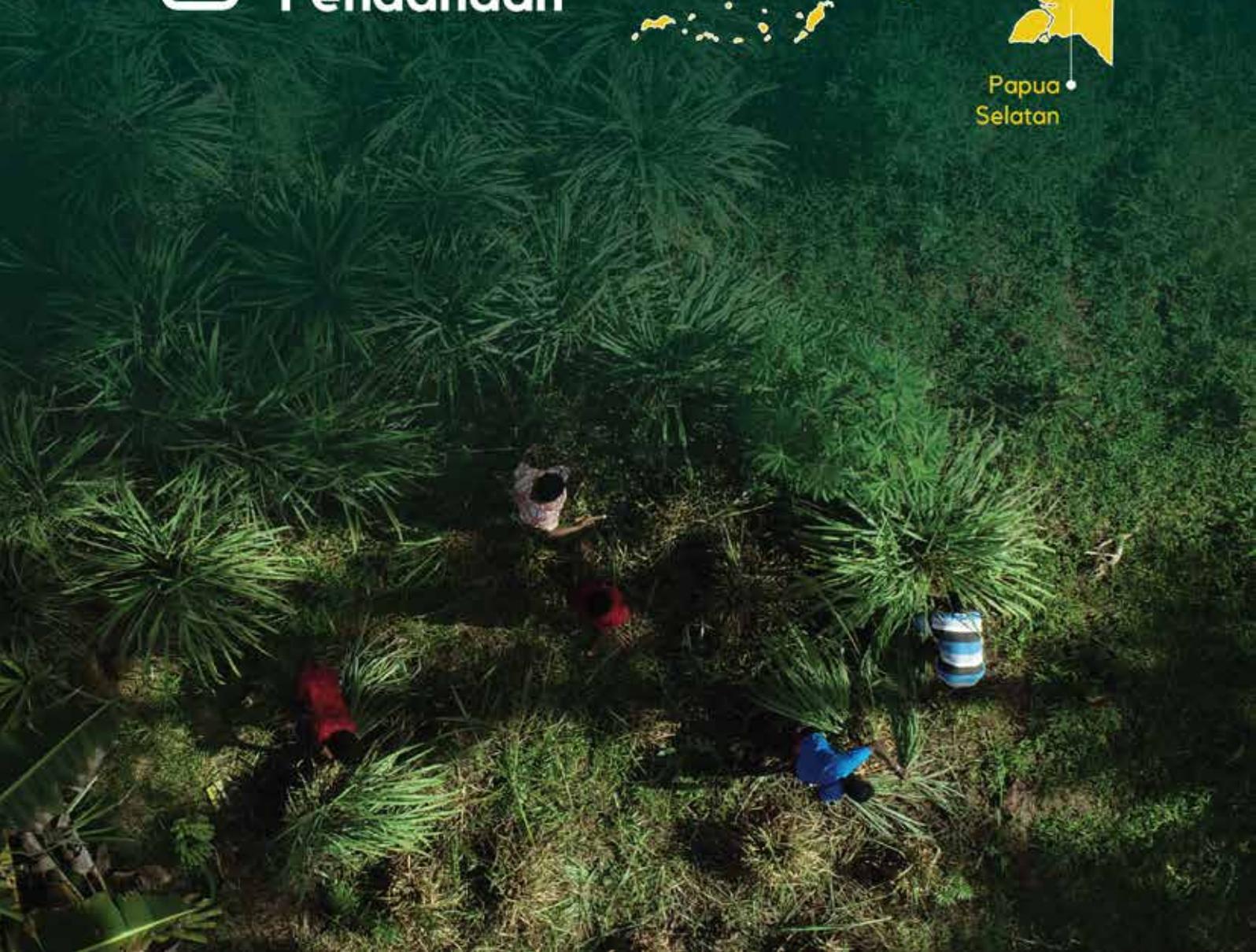


**17 Project**

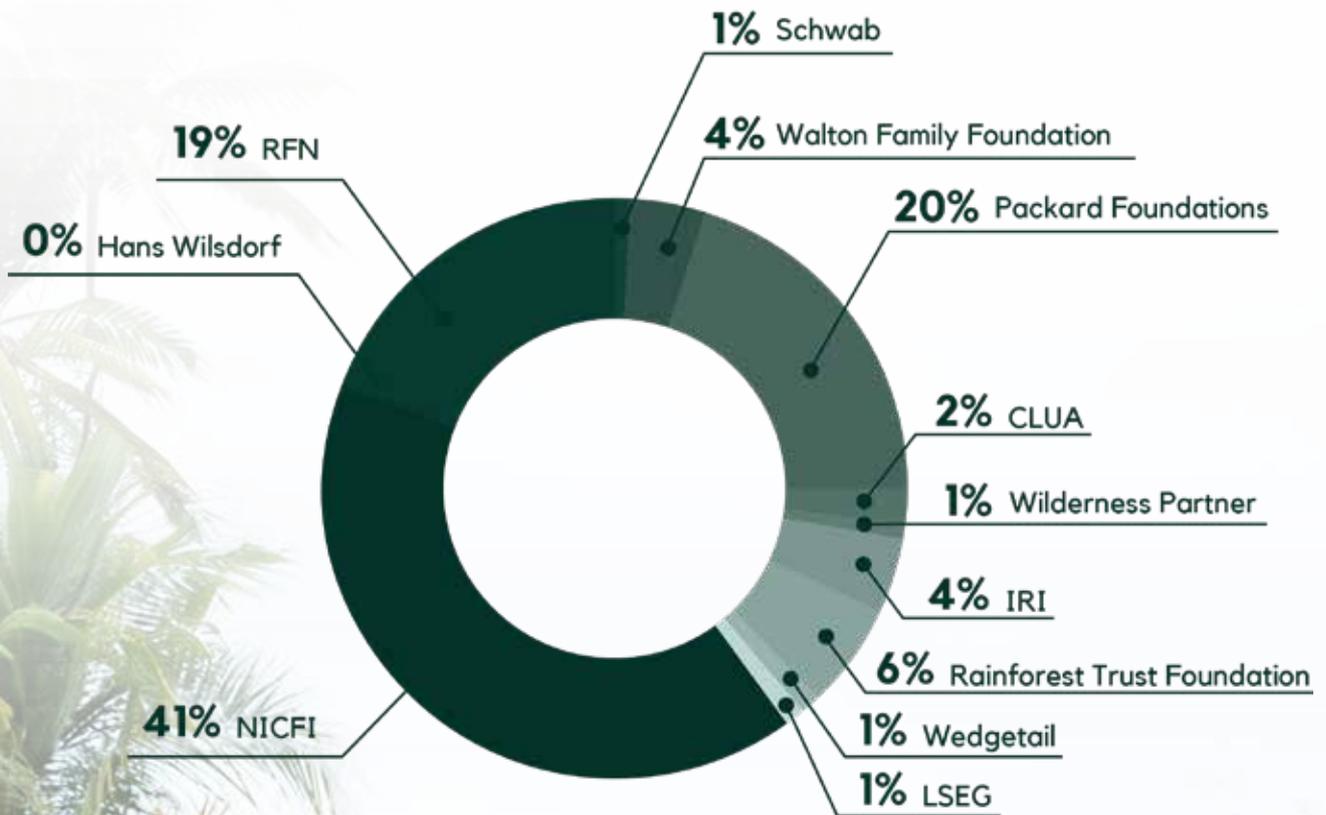
Project diimplementasikan di 6 Provinsi



**12 Mitra  
Pendanaan**



# Donor yang Mendukung



Sepanjang 2023, kami mengelola anggaran senilai kurang lebih Rp 68,2 miliar rupiah untuk 17 project yang tersebar di 6 Provinsi di Tanah Papua dan Maluku. Ada 12 donor internasional maupun lembaga philanthropy yang mendukung program yang kami jalankan. Program utama tetap fokus pada dukungan pengakuan wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengorganisasian anak-anak muda untuk aksi iklim, serta komunikasi publik.

Pada tahun ini juga, kami mendapatkan tantangan dalam hal pendanaan, seiring berakhirnya *project* terbesar kami yang didukung oleh Rainforest Norway Foundation (RFN) secara mendadak. Kami harus menyelesaikan laporan dan urusan administrasi pada akhir Mei 2023. Hal ini tentu memiliki implikasi pada internal organisasi, terutama terkait manajemen dan sumberdaya manusia.

Namun pada dasarnya, persoalan mendasar yang menjadi tantangan bukan terkait administrasi

dan pelaporan, melainkan bagaimana kami harus tetap mampu menjaga stabilitas organisasi dan ritme kerja. Beruntung, meskipun project harus diselesaikan mendadak, RFN tetap menunjukkan komitmennya untuk memastikan rencana kerja kami tetap terimplementasi hingga 2023. Beberapa donor kami yang lain pun, dengan peristiwa ini, tetap menunjukkan komitmen dukungannya kepada EcoNusa dalam bentuk kelonggaran dalam pengelolaan keuangan.

Sejak awal, EcoNusa dikenal sebagai sebuah organisasi yang mapan, baik dalam hal sumber daya manusia, maupun dalam hal pendanaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dua hal inilah faktor utama yang menentukan keberhasilan dan tercapainya target yang kami tetapkan dalam organisasi. Meskipun, pada setiap program yang kami implementasikan, kami juga melakukan upaya-upaya keberlanjutan. Kami berharap, program yang telah kami inisiasi tetap berlanjut dampaknya meskipun pendanaan berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.



# Sumber Daya Manusia

## Jumlah Staff



**A**kuntabilitas dan transparansi terus dijaga di dalam organisasi dengan melakukan kontrol dalam proses implementasinya. Sumber Daya Manusia yang mumpuni menjadi aset organisasi dalam menjalankan tujuan organisasi. Di 2023, kami melakukan review dan sosialisasi SOP untuk memastikan semua staf mematuhi SOP organisasi serta memastikan bahwa SOP yang ada masih relevan dengan kebutuhan organisasi.

Tantangan terkait pendanaan di tahun ini juga mau tidak mau berimplikasi terhadap sumber daya manusia. Dengan berakhirnya salah satu sumber pendanaan EcoNusa, maka organisasi melakukan restrukturisasi dengan melihat kembali kebutuhan, strategi program, kemampuan dan keahlian, dan pendanaan yang tersedia. Dengan adanya pengurangan sumber daya manusia, kami memastikan semua staf bisa saling bersinergi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Penguatan kapasitas dilakukan untuk akselerasi program.

# Memperkuat Pembelajaran untuk Memperluas Dampak

Memastikan akuntabilitas dalam implementasi program adalah hal utama yang selalu kami pegang. Dengan sebanyak 17 project yang kami implementasikan di Indonesia Timur, kami tetap berupaya memastikan bahwa kesemua project saling bersinergi untuk mencapai tujuan utama organisasi. Dalam hal ini, makan Unit MEL kami sangat berperan penting. Sistem MEL yang telah terbangun dipastikan dijalankan dengan optimal untuk memastikan akuntabilitas program.

Pada tahun ini juga, kami mengembangkan sebuah dashboard berbasis digital yang memastikan progress dan capaian implementasi program tercatat dengan baik. Dashboard ini juga sekaligus menjadi alat untuk mengkonsolidasikan data-data progress dan capaian yang diimplementasikan di

lapangan. Selain diakses internal, dashboard juga dapat diakses oleh pihak eksternal.

Di kuartal tiga, kami memfasilitasi kegiatan evaluasi Project EFF yang dilaksanakan oleh tim evaluasi eksternal dari RFN. Evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk melihat sejauh mana program yang kami jalankan di Tanah Papua dan Maluku atas dukungan project ini memberikan dampak yang lebih jauh untuk masyarakat dan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia Timur. Hasil evaluasi menunjukkan dampak positif dalam hal upaya perlindungan hutan, pemetaan partisipatif untuk pengakuan wilayah adat, peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, pengorganisasian anak-anak muda, serta upaya kampanye dan advokasi yang semakin meluas.





